

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Araf, et al. *Politik Militer dalam Penguasaan Tanah: (Belajar dari Tragedi Pasuruan, 2007)*. Jakarta: 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Gounder. *Research Methodology and Research Questions*. 2012.
- Huntington, Samuel P. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Harvard University Press, 1981.
- Karsten, Peter D., Peter D. Feaver, dan Richard H. Kohn. *Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security*. Cambridge: MIT Press, 2001.
- Kothari, C. R. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International, 2004.
- Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keempat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sabine, George H. *A History of Political Theory*. Third Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- Sukma, Rizal, dan J. Kristiadi. *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1999.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Jurnal

Airlangga, Shandi Patria. "Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis." *Cepalo* 4, no. 1 (2019).

Al-Adawiyah, Suif. "Dwifungsi Gaya Baru? Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI 2025 dan Dampaknya terhadap Demokrasi." *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025).

Croissant, Aurel, dan Adhi Priamarizki. "Civil-Military Relations in Southeast Asia." *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 2 (2018).

Harahap, M. Syahnan. "Perbedaan Konsepsi Rechtsstaat dan The Rule of Law serta Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 1, no. 1 (2018).

Karsten, Peter D., Peter D. Feaver, dan Richard H. Kohn. "Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security." *The Journal of Military History* 66 (2002).

Patimah, Ica, et al. "Revisi UU TNI: Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Sipil." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025).

Rasji, et al. “Demokrasi yang Tergerus oleh Dominasi Negara atas Rakyat dalam Politik.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

Romanti, Vita Ayu, et al. “Tinjauan Konstitusional terhadap Prosedur Legislasi dan Supremasi Sipil dalam Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025).

Artikel

Hukumonline. “Catatan Perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia.” 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-perbaikan-indeks-demokrasi-indonesia-lt67db93bb1e2a6/>.

Tempo. “Riset EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Masuk Kategori Flawed Democracy.”

The Economist Intelligence Unit. *Democracy Index 2024: What's Wrong with Representative Democracy?* 2024.